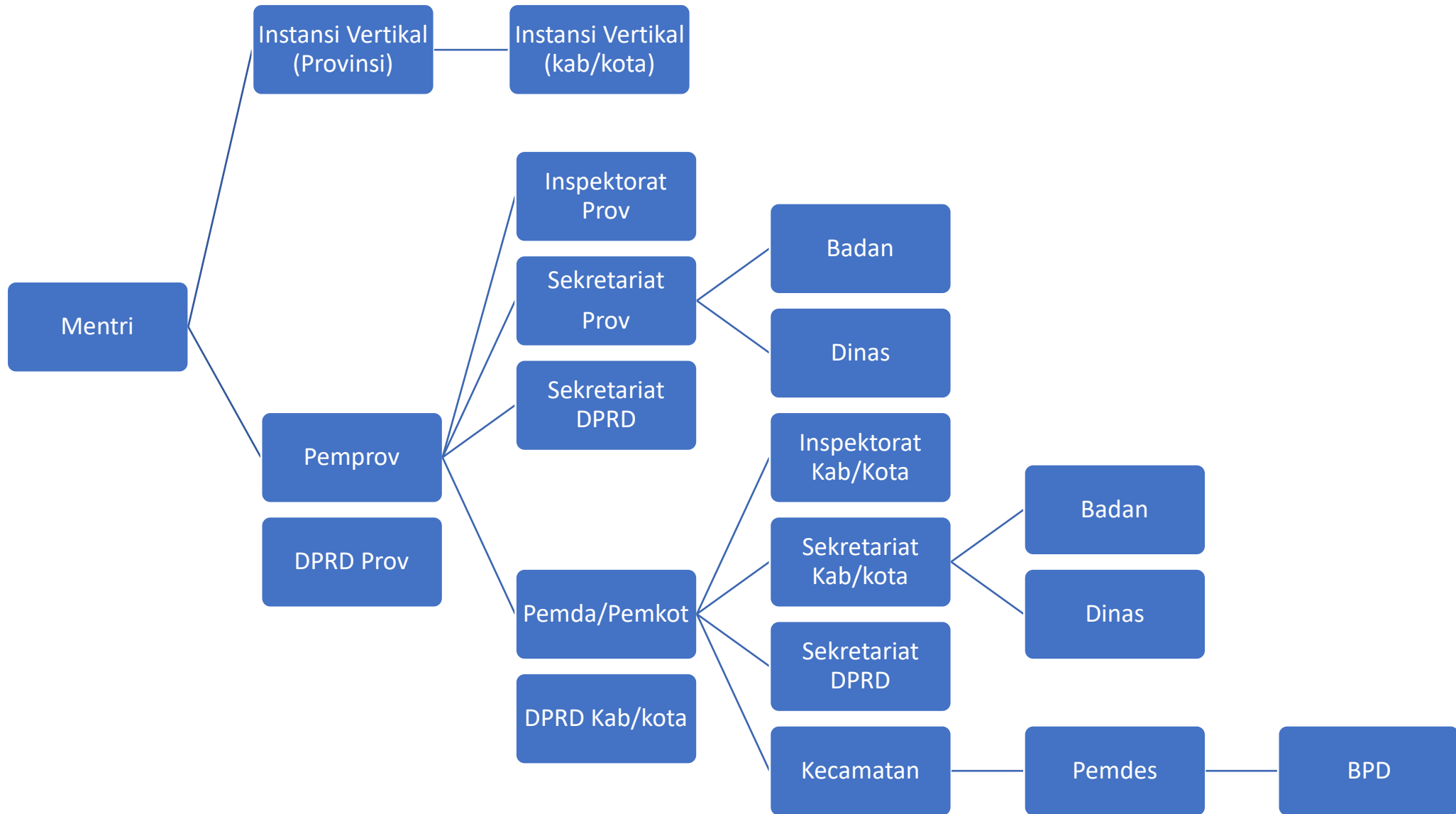


Bentuk dan Tipe Pemerintah Daerah



Pemerintah Provinsi

- ✓ Wilayah kerja Gubernur
- ✓ Wakil Pemerintah Pusat
- ✓ Paling sedikit 5 kabupaten/kota

• Kewenangan

- Urusan lokasinya/ penggunaannya/ manfaat dan dampaknya lintas daerah
Contoh : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penanaman Modal
- Urusan penggunaan SD lebih efisien oleh pemprov
Contoh : Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa penanganan banjir kali Lamong, penanganan banjir kawasan Bengawan Jero, revitalisasi kawasan waduk bunder, dan pembuatan Jabung Ring Dike.
- Urusan kehutanan, kelautan, SD Mineral
Contoh : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul oleh Pemerintah Daerah DIY, dan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 mil.

• Urusan konkuren

- Sendiri oleh daerah provinsi
Contoh : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Mengah Atas yang dikelola Pemerintah Provinsi
- Menugasi daerah kabupaten berdasar asas Tugas Pembantuan
Contoh : Program Penyelenggaraan Jalan Nasional
- Menugasi desa
Contoh : Penyelenggaran pasar desa dan renovasi

• Bertanggungjawab

- Presiden melalui menteri

URUSAN PEMERINTAH DAERAH KONKUREN			
Huruf	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (Pasal 12 Ayat (1))	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (Pasal 12 Ayat (2))	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (Pasal 12 Ayat (3))
A	Pendidikan	Tenaga Kerja	Kelautan
B	Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pariwisata
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pangan	Pertanian
D	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pertanahan	Kehutanan
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Lingkungan Hidup	Energi dan Sumber Daya Mineral
F	Sosial	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Perdagangan
G		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perindustrian
H		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Transmigrasi
I		Perhubungan	
J		Komunikasi dan Informatika	
K		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
L		Penanaman Modal	
M		Kepemudaan dan Olah Raga	
N		Statistik	
O		Persandian	
P		Kebudayaan	
Q		Perpustakaan	
R		Kearsipan	

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kabupaten/ Kota

- ✓ Wilayah kerja bupati
- ✓ Paling sedikit 5 kecamatan untuk kabupaten
- ✓ Paling sedikit 4 kecamatan untuk kota

•Kewenangan

- Urusan lokasinya/ penggunaannya/ manfaat dan dampaknya hanya dalam daerah

Contoh : Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan seperti perizinan pembangunan Mall Sleman City Hall

- Urusan penggunaan SD lebih efisien oleh pemkab/pemkot

Contoh : Pemberdayaan nelayan kecil di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar

- Taman hutan raya

Contoh : Taman Hutan Raya (Tahura) Tuanku Tambusai, Kecamatan Bangun Purba dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rohul

- SD Panas bumi

Contoh : Pengelolaan PLTP Simbolon Samosir yang berlokasi di Hutan Lindung dan Produksi Wilayah Samosir, Tapur, Humbang Hasunduta Dairi

•Urusan konkuren

- Sendiri oleh daerah kabupaten/kota

Contoh : Penyelenggaraan PAUD, penyediaan TPA, dan pembangunan jalan raya kabupaten

- Menugasi desa

Contoh : Posyandu, PKK

•Bertanggungjawab

- Kepada menteri melalui gubernur



Pemberdayaan nelayan kecil di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar

Andani Widayanti, Dosen, UIN Ar-Raniry, Kabupaten Takalar

Instansi Vertikal

- Melaksanakan urusan pemerintah absolut

Contoh :

Urusan agama : Kanwil Kementerian Agama

Urusan Pertahanan : Kementerian Pertahanan

Urusan HAM : Kementerian Hukum dan HAM

Urusan data dan statistik : Badan Pusat Statistik

DPRD PROVINSI

- **Tugas**

- Pembentukan Perda Provinsi** → Membahas, menyetujui, mengajukan usul rancangan, Menyusun program pembentukan
- Anggaran** → Membahas KUA dan PPAS, Perda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD Provinsi
- Pengawasan** → Pelaksanaan Perda Provinsi dan Pergub, peraturan lain, dan dtindak lanjut hasil laporan BPK

- **Tugas dan Wewenang lainnya**

- Memilih gubernur
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur
- Memberi pendapat dan pertimbangan, persetujuan, rencana perjanjian internasional provinsi
- Meminta laporan pertanggungjawaban gubernur
- Memberi persetujuan rencana kerjasama daerah lain atau dengan pihak ketiga
- Melaksanakan tugas wewenang lain.

DPRD Kabupaten / Kota

- **Tugas**

- Pembentukan Perda Kabupaten/kota** → Membahas, menyetujui, mengajukan usul rancangan, dan menyusun program pembentukan
- Anggaran** → Membahas KUA dan PPAS, Perda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD Provinsi
- Pengawasan** → Pelaksanaan Perda Kabupaten/kota dan perbub/perwal, peraturan lain, dan tindak lanjut hasil laporan BPK

- **Tugas dan Wewenang lainnya**

- Memilih bupati/walikota
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota
- Memberi pendapat dan pertimbangan, persetujuan, rencana perjanjian internasional Kabupaten/kota
- Meminta laporan pertanggungjawaban bupati/walikota
- Memberi persetujuan rencana kerjasama daerah lain atau dengan pihak ketiga
- Melaksanakan tugas wewenang lain.

Pemerintah Desa

- Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan desa: Kepala desa & Perangkat Pembantu: Sekertariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis

Contoh :

- **Kewenangan Berdasarkan hak asal-usul**

Contoh : Pemberdayaan masyarakat desa adat Ngadas dalam mempertahankan Tradisi Suku Tengger

- **Lokal berskala desa**

Contoh : Pemberdayaan BPD Desa Bolang Itang Dua dan peningkatan lembaga kemasyarakatan.

- **Ditugaskan oleh pemprov, pemkab, pemkot**

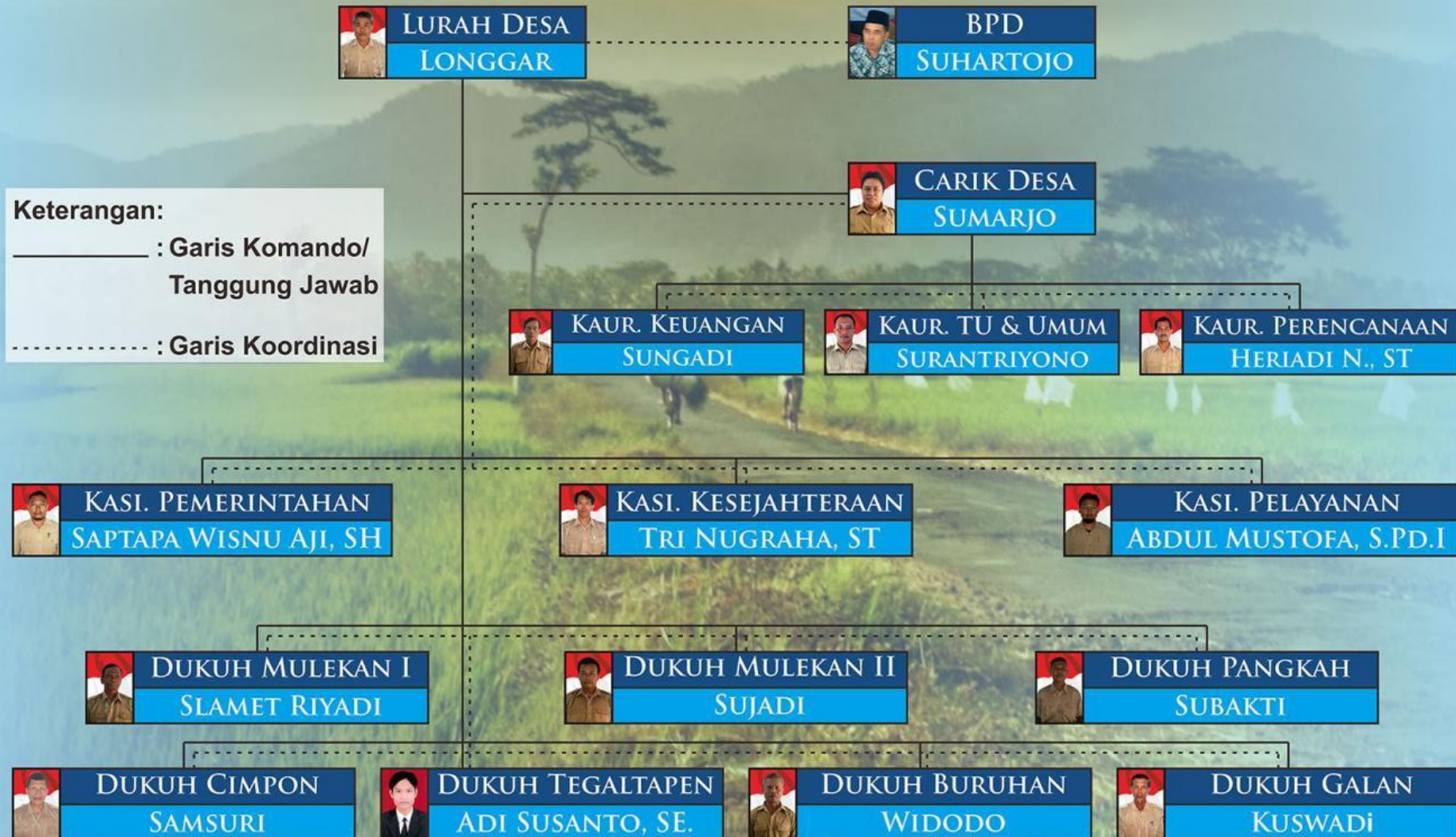
Contoh : Pembangunan dan renovasi pasar desa di Kabupaten Purworejo dengan dana yang bersumber dari APBN

- **Ditugaskan oleh pemprov, pemkab, pemkot sesuai peraturan perundang-undangan**

Contoh : Pengelolaan keuangan dan kekayaan Pemerintah Desa

Contoh Struktur Organisasi Pemerintah Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TIRTOSARI



Pemerintah Desa

a. Badan Permuysyawaratan Desa

- **Kewenangan**

- Memberitahu masa berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
- Membentuk panitia pemilihan

- **Tugas**

- Membahas dan menyepakati RAPERDesa bersama kades
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- Melakukan pengawasan kinerja Kades

- **Hak**

- Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

Perangkat Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota

1. **Sekretaris daerah** : Membantu kepala daerah dalam **penyusunan kebijakan** dan **pengoordinasian administrative** terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Contoh: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang disusun oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk mengatur pola koordinasi Pemerintahan Daerah Yogyakarta. *Contoh di slide selanjutnya*

2. **Sekretaris DPRD** : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; administrasi keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli.

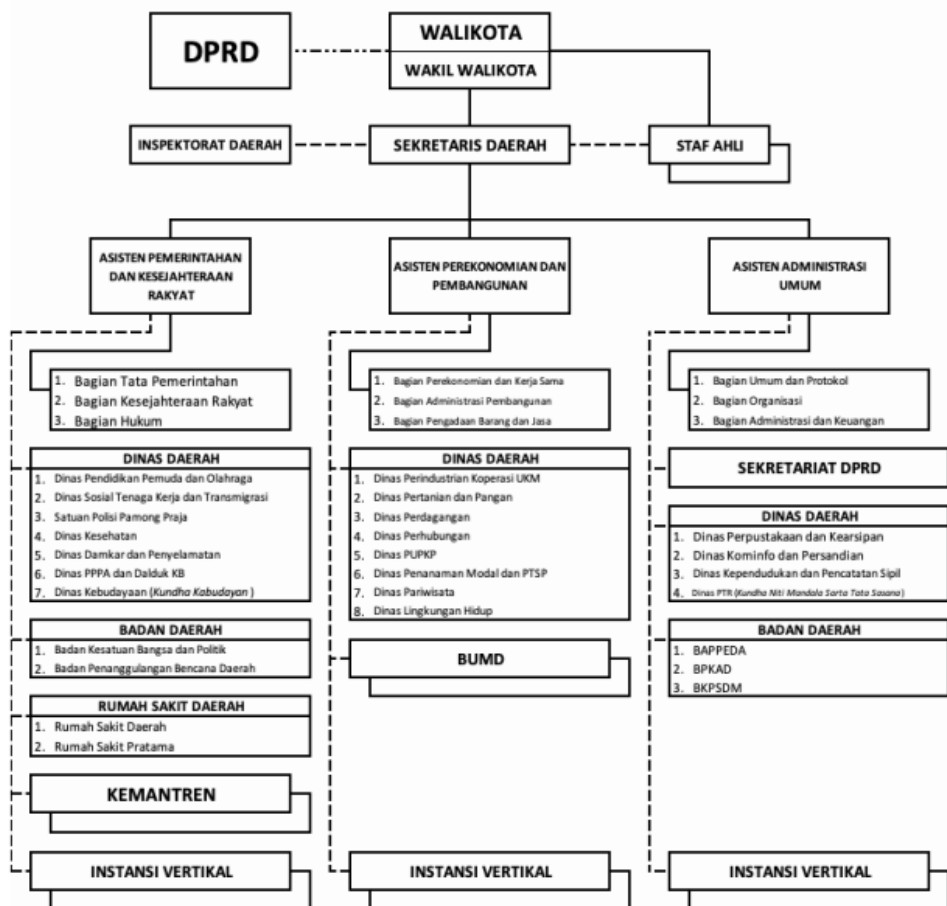
Contoh : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. *Contoh di slide selanjutnya*

3. **Inspektorat** : Membantu kepala daerah **membina dan mengawasi** pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Contoh : Inspektorat Magetan Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Khusus Ribut-Ribut Pengembalian Sisa Uang Pembangunan Jalan Desa Taji

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KOTA
 YOGYAKARTA.

BAGAN POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG
 TAHUN 2019-2023



SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN TANGERANG
 TAHUN 2019

Perangkat Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota

- **Dinas** : dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan
 - Tipe A : mewadahi urusan beban kerja besar
Contoh : Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - Tipe B : mewadahi urusan beban kerja sedang
Contoh : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
 - Tipe C : mewadahi urusan beban kerja Kecil
Contoh : Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Kulon Progo
 - Penentuan beban didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran urusan, kemampuan keuangan, proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan
- Bertanggungjawab pada sekretariat daerah

Perangkat Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota

Badan : Dibentuk untuk melaksanakan **fungsi penunjang (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian & Pengembangan dan Fungsi lain sesuai UU)** urusan pemerintahan

- a. Tipe A : mewadahi urusan penunjang beban kerja besar
Contoh : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
- b. Tipe B : mewadahi urusan penunjang beban kerja sedang
Contoh : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta
- c. Tipe C : mewadahi urusan penunjang beban kerja Kecil
Contoh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kulon Progo
- d. Penentuan beban didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan dan cakupan tugas
- e. Bertanggungjawab kepada Sekertaiat Daerah

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

a. Tipe A : beban kerja besar

Contoh : Kec. Godean (Sleman), Kec. Tegalsari (Kota Surabaya), Kec. Mijen (Kota Semarang), Kec. Jetis (Kota Yogyakarta)

b. Tipe B : beban kerja kecil

Contoh : Kec. Baras (Pasangkayu), Kec. Pringsewu (Pringsewu)

c. Penentuan beban didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/Kelurahan

d. Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk sebagian urusan pemerintahan

Perangkat Daerah Kota

- **Kelurahan**

Contoh : Kelurahan prenggan, purbayan, rejowinangun.

- Tugas membantu camat untuk

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- Melakukan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perbedaan Desa dan Kelurahan

Perbedaan	Desa	Kelurahan
Pemimpin	Kepala Desa	Lurah
Status Jabatan	Pemimpin daerah/desa tersebut	Perangkat Pemerintahan Kabupaten/ Kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut
Kewenangan	Wewenang mengatur dan mengurus	Wewenang mengurus
Status Kepegawaian	Bukan PNS	PNS
Proses Pengangkatan	Dipilih oleh rakyat melalui PILKADES	Ditunjuk oleh bupati/walikota
Masa Jabatan	6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 3 periode berturut-turut dan tidak berturut-turut	Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS
Pembiayaan Pembangunan	Dana berasal dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemkot/Pemkab	Dana berasal dari APBD
Kepemilikan Badan Legislatif	Memiliki badan legislatif (BPD)	Tidak memiliki badan legislatif
Pertanggungjawaban	Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat	Lurah bertanggungjawab kepada walikota/bupati melalui camat